

buletin

rawai



PROGRAM KID INI DIDUKUNG
OLEH PEMERINTAH BELANDA
DISALURKAN MELALUI :



INSAN PELAKON DEMOKRASI

- PEMIMPIN RENDAH HATI
- SEMINAR KKDS
- INAUGURASI SEKOLAH DEMOKRASI

merupakan media informasi sosialisasi demokrasi yang diterbitkan setiap 3 bulan oleh Elpagar (Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat), bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Kemitraan.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab :

Furbertus Ipur (Direktur Elpagar)

Pemimpin Redaksi :

Muhammad Isa

Redaktur Pelaksana :

Ar Irham

Sidang Redaksi :

Furbertus Ipur, Muhammad Isa, Ar Irham

Tim Liputan :

Sri Pujani, Yooce Febrina Tutkey

Kontributor :

Peserta Sekolah Demokrasi

Desain Visual :

Rudy Fransiskus

Alamat Redaksi :

Jl. Abdurrahman Saleh 3 No. 7

Pontianak 78124

Telepon:

(0561) 735155

Email:

buletin@sekolahdemokrasi.elpagar.org

Situsweb:

sekolahdemokrasi.elpagar.org

Redaksi menerima kiriman artikel/opini dan pemasangan iklan layanan masyarakat.

Editorial

Selamat Datang Insan Demokratis

Sekolah Demokrasi Sanggau telah mulai memasuki jilid ketiga dalam keanggotaan. Selamat datang sosok-sosok baru yang akan menjalani kebersamaan, dalam mempelajari dan memahami nilai-nilai demokrasi. Magnet demokrasi telah mendekatkan kita semua untuk bersinergi demi membentuk pribadi lebih baik di masa kini dan mendatang. Demokrasi mengandung unsur kesadaran beserta kemauan saling menghormati dan menghargai, tanpa menganggap diri sebagai “lebih dibanding yang lain”.

Pada Rawai edisi kali ini, begitu banyak dicantumkan kata “demokrasi”. Hampir di seluruh halaman terdapat unsur demokrasi. Sebegitu pentingnya demokrasi untuk dibahas, karena pada dasarnya naluri manusia merindukan kehidupan nyaman dan lebih baik, padahal perbedaan berbagai pandangan seringkali menciptakan suasana tak nyaman. mempraktikkan sikap memahami dan menghargai perbedaan adalah jawaban untuk mewujudkan kenyamanan tersebut.

Penanaman kesadaran terhadap pentingnya saling memahami dan menghargai, adalah proses yang dijalani bersama para peserta Sekolah Demokrasi Sanggau di setiap angkatan. Personal para pelakon empat pilar bangsa, diingatkan untuk mampu menyinergikan pemikiran demokratis. Agar mampu menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukan hanya bisa diwujudkan ketika Pemilu atau demonstrasi. Dalam lingkungan terkecil seperti keluarga dan tempat kerja, mestinya kita menyadari bagaimana sikap demokratis.

Berpikir, bertindak, dan terus mendalami wujud demokrasi dalam setiap lini kehidupan memang dipelajari di Sekolah Demokrasi Sanggau. Lantas bagaimana bentuk output dari proses pembelajaran ini? Jawabannya tentu beragam, bergantung dari individu yang belajar dan bagaimana kesungguhannya untuk mengimplementasikan. Ketika wacana sudah dibuka, apakah bersungguh-sungguh menjalankan konsep hidup demokrasi yang telah diketahui.

Usai menjalani masa-masa kebersamaan selama setahun di Sekolah Demokrasi, tiap peserta memberikan penilaian beragam dari dampak proses pembelajaran. Pada umumnya merasakan manfaat terhadap diri sendiri dan keluarga. Kalau sebelumnya kurang menerapkan sikap saling menghargai dengan istri dan anak, kini telah tergerak untuk memperbaikinya. Perubahan kecil yang memberikan dampak besar, karena interaksi setiap hari bersama anggota keluarga menjadi lebih baik dan nyaman. Inilah gambaran mikro dari sikap demokratis.

Bagi para alumni Sekolah Demokrasi Sanggau, Direktur Elpagar, Furbertus Ipur mengucapkan selamat dan sekaligus berpesan untuk melanjutkan perjuangan demokrasi di Sanggau. “Kalau nanti masing-masing sudah ‘terbang tinggi’, jangan lupa untuk singgah di KKDS (Komite Komunitas Demokrasi Sanggau),” pesannya. Para alumnus yang telah membentuk KKDS, diharapkan terus mengasah dan menambah wawasan serta mengimplementasikan pengetahuan yang didapat.

Redaksi

Daftar Isi

DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU



7
KAMPUNG KITA
Menikmati Sensai Pengorok
di Desa Semayang

7
RESENSI BUKU
Pancasila:
Kompromi Politik Negara Kesatuan

8
RUANG PUBLIK
Buka Paradigma Demokrasi,
Tak Cukup di Warung Kopi

9
CERITE KITE
Belajar dari Pemimpin Rendah Hati

11
KABAR KITA
Praktik Demokrasi, Perjuangkan Hak Sipil
Warna-warni Indonesia Berbaur dalam Inaugurasi

3-5
LAPORAN UTAMA

Lakoni Peran dengan Demokrasi di Hati
Jalankan Amanat Konstitusi Negara
Sekolah Demokrasi Buka Pendaftaran
Angkatan Ketiga
Emansipasi Sosial atau Pasar Global?

5
OPINI
Menyebarkan Virus Demokrasi untuk Sanggau
Lebih Baik

6
VOX POPULI
Apa Perbedaan Cara Pandang yang Anda Ra-
sakan Setelah Mengikuti Sekolah Demokrasi?

Lakoni Peran dengan Demokrasi di Hati

Pengamalan sikap nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan, adalah harapan mulia yang disemai Sekolah Demokrasi terhadap para peserta di setiap angkatan. Demokrasi bukan hanya tentang Pemilu, melainkan bagaimana berpikir, bertindak menjalankan peran sesuai dengan konsep saling menghormati dan menghargai. Apapun “pakaian” yang dikenakan, jiwa seorang yang demokratis harus berpegang kepada dua konsep hidup tersebut.

Kuwadi, alumnus Sekolah Demokrasi Sanggau Angkatan I, sehari-hari menjalankan dua peran, yakni sebagai Ketua KUD perusahaan kelapa sawit, dan Kepala Dusun Semuntai. Dia merasakan dua sisi berbeda dalam peranannya tersebut. Sebagai kepala desa harus mengayomi masyarakat, mau mendengar berbagai masukan, keluh kesah warga Dusun Semuntai. Di sisi lain ketika bekerja sebagai ketua KUD, dia harus tegas terhadap bawahan dan berpihak kepada perusahaan. “Kalau bekerja waktunya serius, jam istirahat baru bercanda. Ya, bisa dibilang beda halnya ketika saya berperan jadi kepala dusun,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Kuwadi sudah setahun menjadi kepala dusun, masih empat tahun lagi jabatannya berakhir. Dia merasa wawasan yang didapat di Sekolah Demokrasi Sanggau, sangat membantunya dalam menjalankan kedua peran tersebut. Kuwadi merasa materi tentang gerakan sosial paling mengena baginya, karena bisa diterapkan dalam peranannya sebagai kepala dusun. “Waktu dapat materi tentang gerakan sosial, saya dapat gambaran bagaimana peranan kepala dusun harus benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Dusun Semuntai berpenduduk 679 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar petani sawit. Kuwadi menuturkan, masyarakat seringkali mengalihkan jalan yang sudah lama rusak tapi tak kunjung diperbaiki. Buruknya kondisi jalan menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Satu di

“Waktu dapat materi tentang gerakan sosial, saya dapat gambaran bagaimana peranan kepala dusun harus benar-benar bekerja untuk rakyat.”

KUWADI
(Alumnus Sekolah Demokrasi
Angkatan I)

antaranya adalah kejadian seorang warga SP I yang mengendarai sepeda motor, tertimpa mobil ekspedisi sembako. Si pengendara motor gagal menyalip mobil yang kesulitan menghindari lubang di jalan. Mobil kemudian terguling dan hanya menimpa kaki si pengendara motor, sehingga kakinya memar.

Sebagai wakil warga, Kuwadi juga sudah menyampaikan keluhan tentang buruknya kondisi jalan, kepada anggota DPRD Sanggau pada pertemuan pertama KKDS di Hotel Narita Sanggau. Dia memperoleh jawaban bahwa jalan itu berstatus jalan negara, maka yang berhak menangani adalah pemerintah pusat. “Kami menginginkan supaya itu jadi jalan provinsi, supaya lebih cepat ditangani pemerintah. Rasanya otonomi tapi kok masih lambat pembangunan,” katanya.

Manfaat lain dari Sekolah Demokrasi Sanggau dirasanya juga menunjang pendidikan. Dulu Kuwadi sempat kuliah di Universitas Terbuka, Fakultas Isipol, tetapi kemudian transfer kuliah. “Sebenarnya dulu sesuai antara jurusan kuliah dan pengetahuan yang saya dapat di Sekolah Demokrasi. Tetapi walaupun sudah pindah jurusan ke ekonomi, tetap bisa menerapkan ilmu yang didapat dari Sekolah Demokrasi, dalam hidup sehari-hari,” katanya. Maret mendatang Kuwadi mengikuti wisuda di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak (STIEP).

Daya kritis terhadap kondisi masyarakat, dirasa Kuwadi sejak bergabung di Sekolah Demokrasi Sanggau. Dia mengaku dulu merasa tidak paham politik. Kini dia merasa ada perubahan selama dan setelah mengikuti Sekolah Demokrasi, seperti misalnya mulai terpikir bagaimana gambaran masa depan yang lebih baik.

Merasakan dampak positif, makanya Kuwadi dulu sangat jarang tidak ikut kegiatan Sekolah Demokrasi Sanggau. Meski kadang cuaca buruk dan kondisi jalanan memprihatinkan, dia tetap semangat mengikuti pertemuan Sekolah Demokrasi Sanggau. Kuwadi rela lelah menempuh perjalanan sejauh 17 kilometer dari kediamannya. “Rasanya rugi kalau bolos. Senang bisa diskusi, refreshing dengan teman-teman. Sekarang sudah lulus rindu teman-teman. Seandainya satu angkatan Sekolah Demokrasi sampai tiga tahun, saya mau ikut terus, haha...” katanya.

Dulu dia tergerak untuk mendaftar sebagai peserta Sekolah Demokrasi Sanggau, ketika melihat pengumuman di koran. “Dulu istri saya juga bilang buat apa ikut Sekolah Demokrasi. Sudah tua. Tapi saya bilang ya kan kesempatan sekolahnya sekarang, tidak masalah biarpun tua. Kalau dulu ada,

“Luar biasa perubahan dan penambahan wawasan yang saya rasakan selama mengikuti Sekolah Demokrasi.”

JULEN
(Peserta Sekolah Demokrasi
Angkatan II)

saya pasti ikut,” ucap pria 42 tahun tersebut.

Semangat belajar yang tinggi di Sekolah Demokrasi juga dimiliki Julen, Kepala Desa Sema yang Kecamatan Kembayan, alumnus angkatan II. Jarak Semuntai sekira 105 kilometer dari pusat kota Sanggau. Sepanjang 9 kilometer di antaranya jalanan belum diaspal. Meski seringkali cuaca buruk dan jalanan memprihatinkan, Julen mengaku selalu bersemangat mengikuti Sekolah Demokrasi. Itu semua karena dia merasakan banyak manfaat menambah ilmu dan memperluas wawasan.

“Luar biasa perubahan dan penambahan wawasan yang saya rasakan selama mengikuti Sekolah Demokrasi. Penyampaian materi tentang reforma agraria oleh Iwan Nurdin, 100 persen mengena. Saya jadi tahu tentang undang-undang pokok agraria dan lainnya,” katanya.

Menurutnya konflik agraria antara warga Desa Semayang dan perusahaan kelapa sawit memprihatinkan. Kesepakatan perusahaan dengan masyarakat, beda janji dengan kenyataan. Awalnya manis ternyata pahit. Tanah yang dijanjikan, sampai sekarang belum dibagikan kepada warga. Lalu terjadi konflik, emosi warga naik, anarkis, warga dikenai hukuman pidana karena merusak aset perusahaan.

Julen menuturkan, bantuan pemerintah belum ada, pemerintah mengakui gagal mendamaikan perusahaan dan warga. “Saya pernah menemui Ketua DPR Sanggau untuk meminta bantuan penyelesaian konflik. Katanya yang menerbitkan izin adalah pihak eksekutif, pihaknya hanya bisa meminta pemerintah memberikan solusi bagi warga dan perusahaan,” ujarnya.

Selama menjalani perannya selama Sembilan bulan sebagai kepala desa, Julen menemui kenyataan bahwa sulit baginya benar-benar merealisasikan tuntutan warga. “Bupati sebagai atasan saya, berpesan agar saya menjaga investasi di daerah. Jadi saya serba salah, harus netral kepada pemerintah, sementara kasihan juga lihat warga. Sekarang saya cuma bisa usaha supaya tidak ada bentrok,” katanya. Ketika berdiskusi di Sekolah Demokrasi, Julen mendapat saran dari Iwan Nurdin, untuk mengecek apakah perusahaan memiliki HGU. Untuk tindakan selanjutnya, saya dan warga belum berani, karena tak paham tentang aturan hukum. “Sejauh ini saya hanya berusaha agar tidak terjadi lagi ledakan emosi warga,” ucapnya.

Julen menjadi Kades sejak sembilan bulan lalu. Dia mengungguli perolehan suara dibanding enam calon lainnya. “Tokoh masyarakat dan tokoh adat mendorong saya untuk mencalonkan diri,” ucapnya. Kepala desa sebelumnya pada November 2011 SK tugasnya dicabut oleh bupati, karena dianggap tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Padahal masa tugasnya masih tersisa setahun lagi. “Terjadi kekosongan jabatan kepala desa, saya prihatin. (Tim Rawai)



Salah satu sesi pertemuan in class Sekolah Demokrasi Sanggau tahun 2012.

Cerita tentang konflik antara masyarakat dan pemerintah, juga disoroti Mantan Ketua Komnas HAM periode 2002-2007, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Seminar dan Lokakarya “Menuju Sanggau yang Demokratis” pada 27 November lalu

“Kita melihat bagaimana Pak Bupati didesak oleh pemodal besar, supaya cepat mengeluarkan izin. Walaupun perusahaan itu belum memenuhi syarat umum yang ditetapkan pemerintahan setempat, akhirnya Pak Bupati mengeluarkan izin. Timbulah konflik sosial berdarah-darah. Itulah yang terjadi di daerah Lampung, Timor-timur, Papua, dan seterusnya,” kata Abdul Hakim.

Dia menyatakan bahwa pasar harus dikendalikan oleh negara. Kita tidak mungkin menolak pasar bebas karena itu sudah suatu mekanisme yang diterima secara universal. Pasar gagal menciptakan keadilan dengan upah buruh yang minim, angka pencari kerja di pasar yang tinggi. Jadi mekanisme pasar tidak bisa mensejahterakan kaum buruh. Negara bisa melakukan intervensi kepada pasar dengan mengeluarkan UMR. Sehingga buruh tidak disia-siakan oleh pasar.

Tugas emansipasi itu adalah amanat konstitusi, yang dilengkapi dengan hak asasi manusia. Hak atas makanan, air, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya merupakan kewajiban negara untuk memenuhi. Jika pemerintah ingin memenuhi kewajiban itu, negara tidak boleh minimalis atau ala kadarnya tapi harus dilakukan secara luas dan aktif.

“Sekarang ini orang jenuh dengan parpol yang nyolong, itung duit dan rebutan kekuasaan. Sesungguhnya politisi dari dulu sudah nyolong karena tidak diawasi,” kata Abdul Hakim. Negara demokrasi bukan negara yang sekali jadi. Itu prosesnya berkesinambungan untuk mendemokratisasi Indonesia.

Sekarang prioritasnya masalah penegakan hukum yang sekarang melemah. Gerakan pemerintah untuk mengemansipasi rakyat ditingkat lokal harus didukung rakyatnya. Rakyat mau mendukung kalau tahu masalahnya. Maka pemerintah lokal itu harus ada transparansi. Tapi masalahnya bupati jarang ada yang transparan. Abdul Hakim percaya demokrasi menjadi pilihan terbaik untuk kedepan. Jika kita

Jalankan Amanat Konstitusi Negara

menganut ototarian maka akan menguntungkan orang super kaya di Indonesia adanya hanya 2% yang memainkan uang. Jadi penting mempersiapkan teman dan rakyat agar bisa dengan benar mengatasi, menyelesaikan konflik dengan benar. Jangan hanya pakai demonstrasi dan angkat parang. Ini yang perlu dilatih agar konflik bisa melahirkan akte damai yang baik. Pentingnya kemampuan masyarakat untuk berunding dan menyelesaikan konflik harus dilatih. Kalau tidak akan ada korban.

Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, membenarkan emansipasi didorong langsung oleh pemerintah untuk rakyat. Banyak sarana yang dikembangkan pemerintah agar partisipasi masyarakat muncul.

Partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemerintah, dimulai dari perencanaan APBD tahun 2013 bisa menembus Rp 1 triliun. Banyak sarana yang harus dikembangkan pemerintah, agar partisipasi muncul. “Termasuk teman-teman Sekolah Demokrasi ini, harus datang saat Musrenbangdes. Jangan kita menunggu undangan. Siapapun yang berkaitan dengan perencanaan daerah bisa terlibat, lalu masyarakat bisa mengawasi pajak dan retribusi yang belum maksimal,” katanya.

Paolus menyanggah banyak yang tidak peduli Musrenbang tingkat desa. Padahal di situlah titik awal jika mau memperkuat partisipasi masyarakat. Kebanyakan yang terjadi adalah masyarakat tidak berpartisipasi, malah memunculkan daftar keinginan.

Dia mengakui angka kemiskinan di Sanggau masih besar. “Rata-rata hanya 6,5 tahun bersekolah. Jadi rata-rata tamat SD. Harapan hidup di Sanggau 69,42 tahun,” ucapnya. Ternyata dengan kondisi kemiskinan seperti itu, partisipasi masyarakat pada Pilkada cukup tinggi. Saat pemilihan gubernur 2012, partisipasi rakyat mencapai 82 persen lebih. Ini peluang buat kita mendorong pemerintah mengemansipasi sosial masyarakat,” katanya.

Koordinator Fasilitas Sekolah Demokrasi Sanggau, Muhammad Isa, mengatakan negara

yang kita bangun tidak minimalis atau pemerintahan yang sudah membentuk unsur pemerintahan, tapi tidak ada fungsinya. “Pemilu itu kan demokrasi yang minimalis. Tapi syaratnya tidak dibangun seperti adanya pendidikan politik.”

Negara melindungi dan menjamin hak rakyat, mendorong serta mengontrol pemerintah melakukan tugasnya. Serta negara mampu mengontrol pasar agar tidak terjadi monopoli pasar. Jadi bukan monopoli pasar yang dibangun seperti yang terjadi di BP Migas. “Yang mau kita bendung sekarang ialah relasi rakyat pada pasar. Pasar bisa mendapatkan keuntungan dan rakyat bisa mendapatkan pelayanan. Jangan sampai pasar menjadikan rakyat Indonesia terpuruk dalam kemiskinan karena upah buruh yang minim,” kata Isa.

Untuk membangun relasi antara negara, rakyat, dan pasar ada di kebijakan publik. Rakyat dan pasar berlomba-lomba mendesak negara mengeluarkan kebijakan publik yang faktanya sekarang berpihak pada pasar. Seperti Freeport yang beroperasi dengan legal. Mekanisme demokrasi bagaimana mendesak kepentingan rakyat. Tugas emansipasi sosial yang dilakukan oleh negara terhambat karena anggaran terbatas, praktik korupsi yang terorganisir. Proses reformasi birokrasi sudah terjadi tapi baru di lembaga peradilan seperti MK dan KPK.

Perwakilan Nasdem, Andreas Sisen, melontarkan beberapa ide agar pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap pasar, untuk melakukan emansipasi sosial. Di bidang ekonomi, para birokrat harus menentukan harga eceran tertinggi (HET) suatu produk, yang ditaati pengusaha dan diawasi oleh masyarakat sipil dan politikus. Keterlibatan empat pilar ini menjadi syarat dari emansipasi sosial.

Anggota Komite Komunitas Demokrasi Sanggau, Jaelani, menambahkan bahwa politisi harus memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam membuat dan mengawasi kebijakan publik. (dian lestari/sri pujiyani)

Sekolah Demokrasi Buka Pendaftaran Angkatan Ketiga

Setelah berhasil mewisuda dua angkatan sebelumnya, awal tahun ini sekolah demokrasi kembali membuka pendaftaran Sekolah Demokrasi Sanggau tahun 2013. Sekolah Demokrasi terbuka bagi pria dan wanita dari empat pilar demokrasi (birokrat, pengusaha, politikus dan masyarakat sipil). Berusia maksimal 40 tahun, minimal lulusan SMA sederajat, mengisi formulir pendataan peserta Sekolah Demokrasi Sanggau tahun 2013, dengan melampirkan fotokopi KTP dan pasfoto berwarna 3 x 4 (2 lembar). Formulir pendataan dapat diambil dan diserahkan di Mess Sekolah Demokrasi di Jl Sutan Syahrir nomor 67 RT 02 RW VII Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Empat puluh pendaftar Sekolah Demokrasi yang dinyatakan lulus, akan mengikuti sekolah Demokrasi gratis dengan program beasiswa selama setahun. Peserta juga akan mendapatkan modul gratis yang menunjang pembelajaran mengenai demokrasi.

Proses pembelajaran Sekolah demokrasi terdiri dari in class (dalam kelas) sebanyak 60 persen, dan out class 40 persen (luar kelas). Adapun materi yang akan disampaikan dalam in class Sekolah Demokrasi terkait dengan demokrasi, HAM, gender, resolusi konflik, pasar global, kebijakan publik, training pengu-

lian, dan lainnya. Sedangkan untuk out class Sekolah Demokrasi berupa outbond, talk show radio, kampanye visit, open space, kunjungan kerja ke eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Menurut Direktur KID, Reza Simamora, di tujuh Sekolah Demokrasi selain Sanggau di pembukaan selalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan Sekolah Demokrasi Sanggau menyanyikan lagu Tanah Air. “Ini sesuatu hal yang jarang kita dengar lagi. Kalau kita lihat banyak lagu-lagu yang bukan dari asal kita. Misalnya gangnam style atau apa lagi lainnya. Ini mengingatkan Sekolah Demokrasi sangat kritis dan peduli dengan demokrasi di tingkat lokal,” ujarnya.

Dosen Theologi yang juga menjadi Ketua Komite Komunitas Demokrasi Sanggau (KKDS), Petrus Musa, pada evaluasi Sekolah Demokrasi pada 25 November 2012, mengatakan Sekolah Demokrasi Sanggau menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang demokrasi, mempersiapkan generasi yang melek demokrasi. Memperkenalkan Sekolah Demokrasi Sanggau dan KKDS kepada masyarakat umum, menumbuhkan rasa kebersamaan dan percaya diri harkat dan martabat alumni SD Sanggau. Selain itu Sekolah Demokrasi Sanggau juga mengembangkan proses pengambilan kebutuhan

secar demokrasi, menggelisahkan para politisi gelap, memaksa Pemkab lebih transparan, memperkuat masyarakat sipil agar dapat mencapai kekuatan politik, kemandirian ekonomi, dan membangun karakter budaya lokal. Membuka pemahaman demokrasi secara global, pengembangan kepibadian/kekuatan mental, Menambah wawasan dan cara berpikir.

Adapun dampak dari adanya Sekolah Demokrasi Sanggau, adalah terbentuknya sarana yang menjembatani dan menyerap aspirasi masyarakat. “Saya diberi kewajiban untuk memperkenalkan KKDS. KKDS diharapkan bisa mendorong demokrasi di Sanggau khususnya. KKDS bukan LSM,” ujar Petrus Musa. Dia menjelaskan bahwa KKDS mediasi empat pilar demokrasi. KKDS dapat berperan menjadi aktor politik lokal yang memiliki wawasan demokrasi.

Menurut Manager Program Sekolah Demokrasi Sanggau, Furbertus Ipur, Sekolah Demokrasi memprovokasi pikiran untuk mendemokratisasi Sanggau. “Bagaimana kita bisa akur dengan seluruh pilar pendukung demokrasi, yakni birokrat, investor, politisi dan civil society. Perlindungan hak sipil politik dan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) akan sulit berjalan jika keempat pilar ini tidak seiring sejalan dalam suatu wilayah,” tuturnya. (sri pujiyani)



Menyebarkan Virus Demokrasi untuk Sanggau Lebih Baik

Burhanuddin
(Peserta Sekolah Demokrasi Sanggau)

Sekolah Demokrasi Sanggau merupakan wahana pendewasaan karakter, berpikir demokratis, dan transformasi pemahaman. Sehingga membuka pandangan lebih luas dengan pengetahuan (wasasan), nilai (agama), keterampilan (action), membaaur langsung pada masyarakat dan menyebarkan virus-virus demokrasi agar masyarakat lebih demokratis, menuju Sanggau yang bersih, profesional, berintegritas, bergait, dan terdepan.

Sudah sangat lama masyarakat di-nina bobokkan oleh kegelapan atau abu-abu serta pengetahuan yang miskin, dikarenakan pemerataan pengetahuan dan informasi tidak berjalan lancar dan kaum berpengetahuan luas masih sungkan dan gengsi untuk bertransformasi pengetahuan. Itulah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya kelahiran manusia-manusia yang demokratis.

Kemunculan Sekolah Demokrasi di Kabupaten Sanggau memberikan warna yang berbeda dengan semangat baru, berlandaskan pemerataan pendidikan dan pembelajaran masyarakat untuk lebih demokratis dengan semboyan atau yel-yel "agen perubahan". Indikasinya adalah masyarakat menjadi semangat ingin belajar, semangat ingin tahu akan aturan, semangat ingin menjadi manusia yang berjiwa sosial, menuju manusia berwasasan luas, bermoral, terampil serta berkarakter.

Sekolah Demokrasi merupakan gagasan kegiatan pembelajaran

masyarakat yang brilian. Sekolah Demokrasi membuka mata masyarakat khususnya masyarakat biasa, yang tadinya tidak mengerti dan paham tentang aturan, prosedural pemerintahan serta Undang-undang ini mereka bisa mengetahuinya.

Sekolah Demokrasi memiliki ciri khas tersendiri dibanding sekolah formal lainnya. Satu di antara contohnya adalah saling bertransformasi pemahaman, sebagai wujud bahwa kebebasan berpendapat sangat penting bagi kemajuan bersama, yang biasa kita sebut sebagai (pengetahuan), pendewasaan karakter lebih terampil dan terarah bahwa manusia adalah makhluk sosial atau bisa dikatakan bagian dari orang lain (keterampilan).

Pendidikan inipun tidak lepas dari keyakinan kita (agama) karena Sekolah Demokrasi mengajarkan sama halnya dengan agama yang kita anut mengajarkan kita (nilai).

Dengan beberapa keunggulan, menurut saya Sekolah Demokrasi masih memiliki beberapa kekurangan. Sekolah ini hanya ada di delapan provinsi, sehingga saya menilai pendidikan demokrasi masih belum merata di seluruh Indonesia.

Sekolah Demokrasi Sanggau hanya dilangsungkan untuk tiga angkatan alumni, dan masing-masing masa pendidikan tiap angkatan selama setahun. Selain itu, Sekolah Demokrasi tidak memberikan title atau gelar kepada alumnusnya. Kemudian dalam periode pembelajaran, terkadang meleset dari jadwal yang telah dibuat, karena terkendala dengan tutor.

Pada masa mendatang, saya berharap agar Elpagar lebih aktif lagi meningkatkan Sekolah Demokrasi, sebagai cermin g bahwa pendidikan yang di berikan sangat penting. Selain itu para admin juga diharapkan lebih jeli dan teliti terhadap permasalahan tutor, agar tidak terjadi pemunduran jadwal atau setidaknya mengkonfirmasi sejak jauh hari terhadap peserta tentang penundaan jadwal.

Terus tingkatkan jalinan silaturahmi antara admin dan peserta Sekolah Demokrasi Sanggau. Bagi para kandidat peserta Sekolah Demokrasi, jangan ragu untuk bergabung. Sekolah Demokrasi adalah pendidikan yang bermanfaat langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. (*)

Emansipasi Sosial atau Pasar Global?

“Jangan sampai pasar bebas ditengah kejayaan ideologi neo liberal sampai membubarkan Negara.” Pesan inilah yang disampaikan mantan ketua komnasham periode 2002-2007, Abdul Hakim Garuda Nusantara berulang-ulang di Seminar dan Lokakarya “Menuju Sanggau yang Demokratis di Hotel Narita Sanggau, pada 27 November lalu.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara dan pejuang hak asasi manusia (HAM) ini mengingatkan bahwa perdagangan internasional sudah menghancurkan Uni Soviet, karena sistem ekonominya bisa didikte oleh pasar bebas dalam membuat kebijakan. Pasar bisa memecahkan suatu daerah yang memberi akses pada pemilik modal agar menciptakan produk lebih murah, lebih efisien dan lebih mudah menjangkau konsumen. Ketika persaingan suatu pasar yang menuntut negara membuat blok-blok pasar seperti pasar bebas ASEAN, maka para buruh lah yang menjadi korban, karena upah mereka menjadi menjadi murah.

Pria 58 tahun asal Jawa Tengah ini mengingatkan pemerintah, untuk menjalankan tugas negara. Tugas negara ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945, bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah dalam suatu UUD Indonesia.

“Jadi jika kita mencermati pembukaan UUD

1945 pemerintahan konstitusi itu bukan pemerintahan minimalis, seperti yang dipraktikkan beberapa tahun lalu di negara barat,” katanya. Pemerintah konstitusi adalah suatu sistem yang aktif supaya rakyat sejahtera. Hal ini disebut tugas emansipasi negara. Di mana negara mengupayakan agar masyarakat dengan keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan menjadi rakyat yang maju, sejahtera, dan setara bersama yang lain.

Menurut dia selama pada usia Indonesia yang usianya akan memasuki 68 tahun, negara pernah menjalankan tugas emansipasi. “Saya ini dari keluarga pedagang biasa, bukan orang kaya. Kelas saya saat itu tidak bisa sekolah, karena yang bisa sekolah pada saat itu hanya golongan aristokrat Jawa. Tapi akibat dari emansipasi pemerintah, saya bisa sekolah. Kita menjadi orang yang melek huruf, melek iptek dan bisa menikmati kesehatan lebih baik dibanding pada zaman penjajahan,” tuturnya.

Banyak tantangan yang menjadi keterbatasan negara untuk memenuhi tugas konstitusi. Tantangannya antara lain anggaran dan sumber pendapatan negara yang terbatas, diperparah dengan praktik korupsi. Lalu kelompok ekonomi yang dominan serakah, dalam mencari keuntungan serta membeludaknya jumlah penduduk.

Akibat jumlah penduduk semakin hari kian banyak, biaya yang seharusnya untuk mengemansipasi sejuta orang, akhirnya anggaran tersebut dipakai untuk mengemansipasi 250 juta orang. “Ke depannya harus dikendalikan laju penduduk. Ini memang berat di Indonesia. Tapi kita harus akui pemerintah RI telah menge-

mansipasi sejumlah orang di zaman Soekarno-Hatta. Soeharto juga demikian, dengan didirikannya Sekolah Dasar dan Puskesmas,” kata Abdul Hakim.

Tapi dalam suatu penelitian dari Belanda, terungkap bahwa emansipasi pada suatu titik terhenti karena tantangan tadi. Sekarang zaman reformasi, peluang untuk mengemansipasi semakin besar. Dulu negara pernah mendistribusikan kekayaan dengan membagikan tanah dan alat produksi, yang dijamin dengan Undang-undang. Tapi program emansipasi ini gagal karena dalam pelaksanaan Undang-undang disabotase oleh kelompok serakah, yang tidak ingin itu terjadi. Sementara petani kalah karena mungkin tidak tahu mengenai hak dan cara perjuangannya, tidak terorganisir dan tidak bisa memikirkan peluang jangka panjang. Sehingga ketika didapat tanah kemudian dijual lagi kepada orang kaya.

Emansipasi adalah proses pembebasan manusia dari benturan alamiah, maupun keterbelakangan manusia. Emansipasi merupakan suatu proses dialog yang maju, bukan ideologi melainkan sejarah sosiologis sangat penting. Ia pertama-tama ialah aksi berdasarkan perjuangan.

Akar-akar emansipasi ada di kaidah dan nilai, bukan pada tataran ideologi dan pelaku. “Kita ingin melihat saudara yang miskin dan terbelakang, bisa maju seperti kita. Itu karena nilai yang ada pada hati kita,” ujar Abdul Hakim. Dia menambahkan bahwa apabila negara kuat tapi tidak mengemansipasi sosial, maka negara itu hanya mengabdikan pada kelompok kaya dan serakah.

Sekarang saya lebih percaya diri. Dulu saya minder dengan orang di sekitar saya. Sekarang masyarakat memandang lebih saya, karena bisa dan mampu mengikuti Sekolah Demokrasi. Kalau di lingkungan sekitar saya mulai mengajak ibu-ibu dan para murid saya untuk membuat event kampung seperti olahraga voli.

DIANA, GURU HONOR



Apa Perbedaan Cara Pandang yang Anda Rasakan

Setelah Mengikuti Sekolah Demokrasi?



Banyak perubahan yang saya rasakan setelah mengikuti Sekolah Demokrasi. Di keluarga sudah ada perubahan, yang tadinya saya bersikap egois, sekarang berpikir bahwa saya memiliki tanggung jawab sama dengan istri, dan kita bisa lebih menerima satu sama lain. Dulunya saya memandang tinggi agama dan suku saya melebihi yang lain. Sekarang saya memandang semua manusia dengan harkat dan martabat yang sama dalam membangun kampung. Di BPD juga saya lebih demokratis, dulu saya suka mencari-cari kesalahan pengurus desa, sekarang saya lebih berfokus untuk memperbaiki kesalahan itu dengan pengarahannya yang baik. **ALOISIUS PIUS, GURU**

Dulu saya berpikir demokrasi melulu soal politik, partai dan pemilihan. Sekarang saya mengerti ternyata demokrasi itu juga menyangkut HAM, gender secara umum dan KDRT secara khusus misalnya. Intinya demokrasi itu luas pemaknaannya. Dulu sebagai bidan saya suka ngotot saat memberikan nasihat kepada pasien. Sekarang tidak lagi, saya hanya memberikan saran dengan informasi yang cukup agar pasien dapat memilih sendiri. Lalu sekarang saya mulai berkeinginan untuk jadi anggota DPR. Saya merasa paling tidak sekarang saya menyukai dunia politik karena terlihat asyik. **TINI PRETTY SIAHAAAAN, BIDAN**



Saya merasakan banyak perubahan di diri dan di sekitar saya, setelah mengikuti Sekolah Demokrasi. Dulu pola pikir saya masih tertutup. Sekarang dari segi kepemimpinan, saya paham cara mengatur seluruh kegiatan. Di dalam hidup bermasyarakat saya bisa mempunyai rasa tenggang rasa yang lebih besar. Saya bisa bergaul dengan lebih banyak subsuku dan pranata sosial yang ada di masyarakat. Hal ini membuat pergaulan saya lebih luas. Sedangkan di dalam keluarga kini lebih harmonis daripada sebelumnya.

TOMY KRISTIAN, KEPALA GUDANG KUD



Secara pribadi saya sudah bertambah wawasan, pikiran tidak terkotak-kotak lagi. Sekolah Demokrasi Sanggau ini ibaratnya sudah kuliah S2. Saya merasa di keluarga sudah menjadi virus demokrasi. Dulu di keluarga saya sering mendominasi istri, sekarang sudah tidak. Sebagai Fasilitator CU Pancur Kasih, saya merasa jadi kaya wawasan dalam sudah memberikan materi pelatihan.

ARMANDUS ANDUS, FASILITATOR CU

Ilmu mengenai politik dan HAM yang saya punya lebih kaya. Ilmu tersebut merubah cara bicara saya. Dulu saya tidak begitu menghargai pendapat orang lain, dan saya lebih sering ngotot dengan pendapat sendiri. Sekarang sebaliknya. Ini membuat komunikasi saya dengan orang-orang menjadi lebih baik. Di Sekolah Demokrasi saya mendapatkan pengalaman baru dengan mengikuti outbond, yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan. Dari outbond tersebut saya bisa bekerjasama lebih baik dengan orang lain. **ANDREAS SISEN, CALON LEGISLATIF**



Menikmati Sensasi Pengorok di Desa Semayang

Burhanuddin
(Peserta Sekolah Demokrasi Sanggau)

Semayang adalah desa yang terletak di Kecamatan Kembayan, yang kami kunjungi dalam kegiatan Kampung Visit beberapa waktu lalu. Kampung Visit adalah kegiatan outdoor yang menjadi satu di antara program Sekolah Demokrasi Sanggau.

Desa Semayang banyak menyimpan seni, budaya, adat istiadat, dan cerita rakyat yang terus terjaga secara turun temurun. Satu di antaranya adalah alat hisap tembakau atau rokok, yang biasa disebut pengorok.

Satu di antara peserta Kampung Visit mencoba nikmatnya pengorok, dibimbing langsung oleh sang pemilik pengorok tersebut. Pengorok terbuat dari bambu yang diambil satu ruas, kira-kira panjangnya 30 hingga 40 sentimeter. Satu ruas bambu pengorok tetap utuh karena berfungsi untuk menampung air agar tidak bocor.

Sekira lima sentimeter dari ruas penampung air dilubangi secukupnya, dan ditancapkan bambu kecil yang dipotong sekitar empat sentimeter, sesuai ukuran lubang tersebut. Sebelum ditancapkan, satu ruasnya dipotong agar udara dapat terhisap dengan bebas, dan bagian atas bambu kecil tersebut tepat pada ruasnya dilubangi secukupnya secara perlahan, supaya tembakau tidak langsung jatuh dan bercampur air.

Setelah itu batang pengorok dimasukkan air secukupnya, sekira dua hingga tiga sentimeter di bawah bambu kecil supaya orang mudah menghisapnya. Setelah itu di atas bambu kecil diberi tembakau sebesar jari kelingking.

Letakkan batang pengorok rapat-rapat pada mulut kita, kemudian kita bakar tembakau tersebut sembari menghisapnya, nah barulah kita akan merasakan betapa nikmatnya merokok dengan alat hisap tradisional pengorok. Selain bentuknya yang unik, pengorok juga memiliki sensasi bunyinya... kluduk-kluduk wuss...



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU

Masyarakat Desa Semayang dan beberapa orang yang masih menggunakan pengorok hingga saat ini, meyakini nikotin pada rokok akan jatuh dan tersaring ke dalam air di dalam bambu. Mereka berasumsi merokok dengan pengorok akan lebih sehat, dibandingkan merokok langsung.

Di akhir kunjungan, ternyata warga memberikan kejutan dengan menghadiahkan pengorok kepada Ar Irham, satu di antara anggota kelompok kami. Pengorok itu menjadi bingkisan sangat istimewa, karena ternyata sengaja warga buat pada dinikmati, sebelum kami melanjutkan kegiatan.

Otomatis Ar Irham menyambut kado spesial itu dengan sangat antusias. Senyum sumringah mengembang di wajahnya. Kami juga sangat bersyukur, tentu jadi lebih mudah kalau nanti ingin menikmati sensasi merokok dengan pengorok, tak perlu datang langsung ke Desa Semayang terlebih dahulu.

Resensi Buku:

Pancasila: Kompromi Politik Negara Kesatuan

Soekarno pernah berkata, "Republik Indonesia memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar (bintang pimpinan) dinamis." Leitstar itu diterjemahkan oleh Soekarno menjadi Pancasila.

Ketika Soekarno menyampaikan tentang Pancasila, dirinya memiliki harapan besar bahwa Pancasila akan menjadi landasan utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila mampu menjadi wadah sekaligus nilai dasar bagi semua kepentingan kelompok di Indonesia pada saat itu. Sejatinya, juga berlaku pada masa sekarang ini.

Buku ini merefleksikan kesadaran dan keprihatinan, bahwa krisis yang mendera kehidupan kebangsaan ini begitu luas cakupannya dan dalam penetrasinya. Kunci jawaban krisis itu sesungguhnya bisa di temukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup negara Indonesia.

Yang diperlukan adalah mengikuti cara Soekarno yang membawa nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu Pancasila sejak awal berdirinya Indonesia. Menggali kembali Pancasila itu, mengargumentasikan dan kontekstualisasikannya dengan kehidupan masa kini dan masa depan.

Penggalian nilai-nilai dalam Pancasila, melalui sila-silanya yang dikupas satu persatu secara mendalam di buku ini, merupakan suatu ingatan

akan harapan bangsa. Harapan untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur pada saat itu, di masa identitas bangsa masih menjadi konsep.

Lewat buku ini, nilai-nilai dalam Pancasila kembali diingatkan untuk menjadi harapan yang sama meskipun dalam bentuk krisis yang berbeda. Ketika bangsa ini tengah mengalami identitas krisis atas ketidakmerdekaan, ketidakdaulatan, ketidakadilan dan ketidakmakmuran, nilai-nilai dalam Pancasila memungkinkan untuk menjadi harapan kembali untuk re-identitas bangsa.

Sang penulis, Yudi Latif, merupakan penulis yang produktif. Ia menulis dan mempunyai rubrik tetap di sejumlah media massa dan jurnal. Selain menulis dan menyunting sejumlah buku, ia juga sesekali muncul tampil di televisi dan radio sebagai komentator isu-isu sosial politik.

Yudi menamatkan S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Padjajaran (1990), S2 dalam Sosiologi Politik dari Australian National University (1999), dan S3 dalam Sosiologi Politik dan Komunikasi dari Australian National University (2004).

Beberapa penghargaan pernah diraih Yudi Latif. Prestasi terbarunya pada 7 Desember 2012, meraih penghargaan "Megawati Soekarnoputri Award-2012" untuk kategori Pahlawan Muda Majukan Bangsa bidang Perjuangan Kebhinekaan. (net)

Penulis	: Yudi Latif
Jumlah halaman	: 667
Edisi	: Hard cover
Tahun terbit	: 2011
Penerbit	: Gramedia Pustaka Utama





Buka Paradigma Demokrasi, Tak Cukup di Warung Kopi

**Hance Edwin Talumepa
(Peserta Sekolah Demokrasi
Sanggau)**

Di Kabupaten Sanggau, warung kopi adalah satu di antara tempat paling efektif menyebarkan berbagai paradigma, selain bisnis. Hal yang paling sering dibahas di warung kopi adalah anggapan bahwa politik itu “kotor”. Ini adalah paradigma, celakanya diyakini tanpa dipikir. Kelanjutan paradigma itu adalah keyakinan menuju kehancuran, yaitu sebuah absurditas politik untuk berubah menjadi seni politik bagi kesejahteraan banyak orang

Saya menilai percakapan warung kopi lebih dekat kepada *idle talk*, yaitu pembicaraan yang tidak sistematis, berubah-ubah dan tak teruji. Tidak ada pakar, ahli dan dosen yang berkompeten di sana. Adanya di warung kopi adalah propaganda tanpa dipikir. Silakan uji coba sendiri, karena tidak ada kesepakatan pembatasan masalah, sungguhlah secara tiba-tiba tema yang berbeda dari tema pembicaraan sebelumnya maka percakapan akan berubah pula. Itulah *idle talk*, yaitu pergunjangan yang bisa mengarah kepada debat kusir. Karena itulah disebut percakapan warung kopi, karena kebetulan tempatnya di warung kopi.

Pembicaraan di warung kopi sangatlah berbeda dibanding in class Sekolah Demokrasi yang teratur dan tertata percakapannya. Lewat pembelajaran pendidikan politik Sekolah Demokrasi Sanggau, saya melihat beberapa persoalan tentang proses demokratisasi yang terjadi di Sanggau, secara khusus adalah pandangan politik kekuasaan, yaitu politik praktis.

Meminjam pemikiran Reza AA Wattimenna, krisis abstraksi adalah ketidakmampuan memikirkan hal-hal yang melampaui kepentingan temporal, yakni individu dan lingkaran kelompok partikular mereka. Pada level individual orientasi utama adalah meraih kenikmatan. Kenikmatan itu didapat jika mempunyai sumber daya untuk meraihnya yang dalam hal ini adalah uang. Maka setiap di dalam individu ada didorong oleh suatu kekuatan yang di dalam teori kapitalisme disebut sebagai *profit motive*, profit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih lagi.

Tidak ada pertimbangan soal kesejahteraan orang lain. Ini karena ketidakmampuan berabstraksi, yaitu kelirunya pendidikan politik di masyarakat yang terlampau teknokrasi dan mengesampingkan pendidikan yang berfokus kepada aspek-aspek manusia dan filosofis. Dengan demikian krisis ini bersifat sistemik, sehingga sulit mencari individu yang bersalah menyebarkannya.

Memang itulah realitas paradigma politik dalam konteks lokal proses berdemokratisasi di Sanggau. Sering sekali saya menemukan berbagai percakapan oleh kalangan yang berbeda di warung kopi, kantor dan tempat publik lainnya membicarakan betapa PEMILU PILGUB baru-baru ini dipercepatkan secara parsial. Artinya masyarakat masih terkotak-kotak dengan suku dan agama dan kepentingan tentang siapa calon pemimpin. Mereka melihat dengan “mata” prasangka, yaitu prasangka etnis, agama dan antar kepentingan golongan.

Lebih parahnya jika pemimpin malah memanfaatkan situasi kekurangpahaman masyarakat justru dengan mempertajam prasangka tersebut, sehingga masyarakat tidak memiliki referensi pembandingan tentang figur kepemimpinan yang ada. Dan hal ini lah yang memunculkan keyakinan palsu. Sulit sekali mencari pemimpin yang berparadigma melampaui abstraksi temporal dan parsial. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak persoalan yang dihadapi secara khusus oleh masyarakat sanggau. Krisis Abstraksi itu telah menyebar pada bidang-bidang lainnya, baik oleh kalangan birokrat, pengusaha dan partai politik.

Kedua paradigma di atas adalah suatu refleksi yang di dapat melalui pendidikan politik in class dan out class oleh Sekolah Demokrasi Sanggau. Oleh karena Partai Politik di sanggau tidak memberikan pendidikan politik secara sistematis dan berkelanjutan, maka menurut saya kehadiran Sekolah Demokrasi Sanggau masih perlu dilanjutkan.

Tidak hanya saya sendiri, tetapi beberapa kesaksian teman-teman yang lain juga mengatakan bahwa mereka lebih terbuka pola pikirnya ketika masuk Sekolah Demokrasi. Ini menurut saya bukan propaganda negative politik praktis, apalagi mengarahkan untuk masuk partai politik atau anti partai politik. Peserta Sekolah Demokrasi diberi kebebasan berpikir bahkan dorongan untuk berani berpikir sebagaimana pikiran Immanuel Kant: ‘*Sapere Aude*’, Beranilah Berpikir.

Kehadiran Sekolah Demokrasi Sanggau, sejauh ini saya nilai berdampak terhadap pandangan pribadi saya menjadi lebih dewasa dalam berpolitik, dan akhirnya menularkan ke lingkungan yang lebih luas.

Menurut saya program dua tahun ini tidaklah mencukupi, karena belum menyentuh secara mayoritas. Menurut saya Sekolah Demokrasi Sanggau mesti

berkelanjutan dalam suatu daerah, yaitu wilayah kecamatan. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Ignas Kleden, bahwa tingkat kabupaten pada masa Orde Baru telah terjadi Depolitisasi bahwa kegiatan politik waktu itu melarang wilayah di bawah tingkat kabupaten, akibatnya untuk waktu sekurang-kurangnya 20 tahun selama Orde Baru warga Indonesia yang berada di bawah tingkat Kabupaten menjadi buta politik dan memandang politik menjadi suatu yang berbahaya dan harus dihindari. Pandangan Ignas Kleden ini kelihatannya sama dengan pengamatan saya pada berbagai percakapan politik di jalanan.

Hendaknya Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan Elpagar, mendorong dan memfasilitasi sel-sel baru dalam penyelenggaraan pendidikan politik di berbagai daerah. Tidak dapat dipungkiri hal ini membutuhkan dana yang besar pula, karena di situ akan ada diskusi yang mengundang nara sumber dan pembicara, tetapi hal ini dapat diadakan kerjasama dengan partai politik dan pemerintah sebagai mitra. Ketika hal ini terjadi yang ada adalah keterlibatan dari para birokrat dan pemimpin serta pengusaha untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Tentu saja ini mengandaikan gerakan moral, dan dukungan dana yang sangat besar tetapi hal ini perlu di coba, sehingga para birokrat yang menduduki jabatan penting ikut menjadi peserta, pengayom dan pendukung Pendidikan Politik di wilayah lokal. Apakah ini absurd, yaitu para pelaku kepentingan yang sudah menjabat ‘raja kecil’ mau merelakan dirinya untuk melampaui paradigma parsial dan ego sektoral. Mudah-mudahan dan mari kita coba.

Berkaitan dengan sasaran perekrutan, ada baiknya Penyelenggara Sekolah Demokrasi di Sanggau dalam hal ini Elpagar, mencari suatu solusi baru untuk merekrut peserta yang berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam presensi. Memang kesulitannya adalah perekrutan awal tidak dapat menjamin mengenai siapa yang akan aktif atau tidak. Hal ini berkaitan dengan presensi peserta sebelumnya yang tidak seratus persen kehadirannya-memang tidak semua peserta- karena faktor kesibukan pekerjaan sehari-hari. Perekrutan peserta mesti mempertimbangkan faktor ini. Saran saya adalah melihat latar belakang pekerjaannya yang relatif tidak terlalu sibuk. Perekrutan terhadap kalangan anggota DPRD misalnya di satu sisi sangat tepat, sebab para penyusun kebijakan ini akan lebih baik apabila di tambah perbekalan pengetahuan, nilai, dan keterampilan berdemokrasi.

Di Sekolah Demokrasi Sanggau, diterapkan persuasif partisipatif. Tetapi di sisi lain benturan jadwal pasti tak terhindarkan. Untuk kalangan legislatif sebaiknya tetap direkrut, dengan catatan tetap memberikan dispensasi kompensasi tugas terhadap presensinya. Untuk mengetahui personelnya, barangkali perlu dilihat agenda kerja dari anggota DPRD itu (misalnya agenda di tahun 2013 ini) sebab setiap Komisi di DPR berbeda frekuensi. Untuk kalangan birokrat, pengusaha, dan anggota partai politik, juga mesti melihat agenda kerja sehingga diharapkan dengan adanya kehadiran yang maksimal. (*)



Humor Politik

Pengadilan Tipikor

Pada puncak pengadilan korupsi politik, Jaksa penuntut umum menyerang saksi.

“Apakah benar,” teriak dia, “bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?”

Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan.

“Bukankah benar bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?” ulang pengacara.

Saksi masih tidak menanggapi.

Akhirnya, hakim berkata, “Pak, tolong jawab pertanyaan Jaksa.”

“Oh, maaf,” saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, “Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda.”

(net)

Perdana Menteri Jepang Tolak Gaji Belajar dari Pemimpin Rendah Hati

Kita sudah seringkali mendengar pemimpin di luar negeri yang mengundurkan diri, lantaran mengakui kesalahannya. Satu di antaranya adalah mantan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan pada 26 Agustus 2011. Dia bahkan selama setahun tidak menerima gaji sebagai perdana menteri, hingga krisis di reaktor nuklir Fukushima berakhir.

Fukushima adalah reaktor nuklir yang dibangun pada tahun 1960 oleh pemerintah Jepang, dan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ada lima reaktor yang dimiliki Fukushima, selama ini reaktor tersebut berjalan baik-baik saja dan menjadi Penopang Utama kebutuhan listrik untuk kota Tokyo.

Malang tak dapat di tolak, ternyata gempa bumi dan gelombang tsunami dahsyat yang terjadi setahun lalu, telah memporakporandakan reaktor nuklir yang ada di Fukushima tersebut.

Sejak saat itu Jepang mengalami krisis bencana nuklir nasional yang tak kalah hebat dengan peristiwa Chernobyl di Rusia.

Dari kelima reaktor yang ada, satu persatu reaktor nuklir itu mulai mengalami kebocoran dan mengeluarkan radiasi, menyebar dari reaktor ke wilayah yang ada di Fukushima. Berbondong-bondong penduduk Fukushima mengungsi ke tempat sejauh-jauhnya dari kota Fukushima agar tidak terkena radiasi nuklir yang sangat mematikan itu.

Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Naoto Kan. Sebagai seorang pemimpin sejati ia malah meminta pada aparatnya untuk mengantarnya dengan helikopter langsung menuju lokasi bocornya reaktor Fukushima, ia tidak puas hanya mendengar laporan dari bawahannya bahkan ia tidak puas hanya melihat melalui kamera video yang dipasang pada robot bergerak, untuk memantau reaktor yg ada di Fukushima.

Naoto Kan datang sendiri, menyaksikan dan terjun langsung ke lokasi tempat reaktor tersebut yang mengalami kebocoran. Dia berani mati untuk mendekati reaktor bocor dan kemungkinan setiap saat bisa saja meledak serta menewaskannya.

Banyak reporter asing geleng-geleng kepala tak habis pikir dengan tindakan Naoto Kan. Menurut mereka biasanya pada negara Amerika saja,

jika ada kejadian seperti ini pasti presidennya akan segera diselamatkan terlebih dahulu ke tempat yang paling aman.

Kantor berita CNN juga melansir berita bahwa sang perdana menteri merasa bersalah dan meminta maaf pada penduduk Fukushima, atas terjadinya tragedi ini, dan ia mengatakan mulai bulan ini ia tidak mau menerima gaji bulannya (20 ribu dolar AS= Rp 200 juta) sampai krisis ini berhasil dituntaskannya.

Berselang setahun masa penanganan krisis nuklir Fukushima, akhirnya reaktor nuklir dapat dijinakkan. Hampir semua penduduk Fukushima selamat dari bencana radiasi nuklir yang mematikan.

Lantas, apakah Naoto Kan segera menceritakan betapa hebat dirinya dalam menangani masalah bencana nuklir, agar ia dielu-elukan oleh masyarakat Jepang? Ternyata tidak sama sekali.

Dia hanya mengumumkan laporan status terakhir dari Fukushima. Setelah itu Naoto Kan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri karena Fukushima telah selesai diatasi, dan berangsur-angsur mulai dinyatakan aman.

Presiden Termiskin di Dunia

Sebagian besar politisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, biasanya memiliki gaya hidup yang berbeda 180 derajat dengan rakyat pemilihnya. Tinggal di rumah mewah, pakaian mahal, mobil mewah, dan gaji besar. Namun, semua hal itu tidak berlaku bagi Presiden Uruguay, Jose Mujica. Sejak dilantik menjadi presiden pada 2010 lalu, politisi berusia 77 tahun ini layak mendapat gelar presiden termiskin di dunia.

Bagaimana tidak, pria bernama lengkap José Alberto Mujica Cordano ini mendonasikan 90 persen gajinya setiap bulan, yaitu 12.000 dollar AS atau hampir Rp 120 juta, untuk berbagai kegiatan amal. Tak hanya itu, pria yang oleh kawan-kawannya dipanggil Pepe ini juga menolak tinggal di kediaman resmi kepresidenan di ibu kota, Montevideo. Mujica lebih memilih tinggal di tanah pertanian di luar ibu kota. Bahkan, jalan menuju kediaman Mujica belum dilapisi aspal.

Tak ada penjagaan ketat pasukan elit kepresidenan. Hanya dua polisi dan anjingnya yang hanya memiliki tiga kaki, Manuela, yang terlihat mengawasi di pintu masuk pertaniannya. Di pertaniannya, Mujica dan istrinya bahkan menanam sendiri bunga-bunga yang menjadi pemasukan baginya. Apa alasan Mujica memilih hidup sederhana meski jabatannya adalah seorang presiden?

“Saya disebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih,” kata Jose Mujica

“Hampir seluruh hidup saya habiskan dengan cara seperti ini. Saya bisa hidup baik dengan apa yang saya miliki saat ini,” kata Mujica sambil duduk di sebuah kursi tua di kebunnya.

Dengan mendonasikan sebagian besar gajinya sebagai presiden untuk rakyat miskin dan pengusaha kecil, maka setiap bulan Mujica hanya menerima kurang dari Rp 800.000.

Pada 2010, ketika kekayaan pribadinya diumumkan yang merupakan kewajiban pejabat pu-

blik Uruguay, saat itu total kekayaan Mujica hanya 1.000 dollar AS atau kurang dari Rp 10 juta. Uang sebanyak itu hanya bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil VW Beetle keluaran 1987.

Setelah dua tahun menjadi presiden, kekayaan Mujica memang bertambah. Itu pun setelah dia menambahkan aset milik istrinya berupa tanah, beberapa traktor, dan sebuah rumah. Kekayaannya mencapai 215.000 dollar AS atau sekitar Rp 2 miliar, masih terbilang miskin untuk seorang kepala negara. Bahkan, kekayaan Wapres Daniel Astori dua pertiga kali lebih besar ketimbang orang nomor satu di negeri juara dunia sepak bola pertama kali itu.

Apa penyebab Mujica begitu miskin? Ternyata, selama 1960-an sampai 1970-an, dia adalah anggota pemberontak Tupamaros, kelompok bersenjata berhaluan kiri yang terinspirasi revolusi Kuba. Dia pernah enam kali tertembak dan mendekam 14 tahun di penjara. Sebagian besar masa penahannya dilalui dalam kondisi yang sangat buruk dan dalam sel isolasi. Namun, masa-masa dia dalam penjara itulah yang menurut Mujica membentuk kepribadian dan pandangan hidupnya.

“Saya disebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih,” ujarnya berfilosofi.

“Ini adalah masalah kebebasan. Jika Anda tak memiliki banyak barang maka Anda tak perlu bekerja keras untuk mempertahankannya dan bekerja seumur hidup layaknya budak. Dengan cara seperti ini, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri,” tambah dia.

“Banyak yang mengatakan saya orang tua gila atau eksentrik, tapi ini adalah masalah pilihan,” lanjut dia.

Meski banyak mengundang pujian, tetap saja banyak yang mengkritik. Kelompok oposisi mengatakan, pemerintahan Mujica tak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki pelayanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, popularitas Mujica menurun hingga 50 persen saat ini.

Namun, Mujica tak perlu khawatir soal popularitas. Undang-undang Uruguay membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali. Itu berarti, pada 2014 mendatang Mujica akan pensiun dan menghabiskan waktunya menanam bunga ditemani istrinya dan Manuela, si anjing berkaki tiga.

Bagaimana dengan pemimpin di Indonesia? Sepertinya rakyat belum banyak mendengar pemimpin yang hidup sederhana dan berani mundur akibat kesalahannya. Tetapi telah mulai muncul beberapa pemimpin dengan sosok mau turun langsung ke masyarakat dan menolak mobil dinas mewah.

Selain itu telah terjadi sejarah baru di Indonesia pada 7 Desember lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng mengundurkan diri dari posisinya setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang.

Tentu rakyat berharap Indonesia tidaklah menjadi negara yang kesulitan mencari pemimpin berkualitas, rendah hati, dan hidup sederhana. Dari sekian juta rakyat Indonesia, seharusnya negara ini tidak harus kesulitan dari segi kuantitas untuk memiliki pemimpin berkualitas. Kenyataan bahwa masih sulit untuk merealisasikannya, tentu menimbulkan tanda tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem pengkaderan pemimpin? Menjadi penting untuk menciptakan sistem dan menjalankan pengkaderan yang mampu menjawab tanda tanya tersebut. (net/bbc/dian lestari)

NET



Mantan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan.

Seminar Komite Komunitas Demokrasi Sanggau

Praktik Demokrasi, Perjuangkan Hak Sipil

Alumni Sekolah Demokrasi Sanggau Angkatan I yang tergabung dalam Komite Komunitas Demokrasi Sanggau (KKDS) menggelar seminar bertajuk Peranan Positif Partai Politik Dalam Pembangunan (Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan), di Hotel Grand Narita Sanggau, Senin (17 Desember 2013).

Di sudut ruang serba guna Hotel Grand Narita, tamu-tamu antusias mendatangi meja yang menyajikan kopi dan teh serta snack pagi. Tak jauh dari sana, dua sampai tiga orang menunggu di meja registrasi. Dengan penampilan rapi, para tamu saling bertukar kabar secara kekeluargaan menunggu acara dimulai. Antusiasme untuk mendapatkan informasi mendorong mereka untuk hadir di sana.

Ketika seminar dimulai, para peserta serius menyimak presentasi Rustam Ibrahim sebagai anggota badan pengurus harian Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Dia memaparkan tentang delapan hak-hak dasar warga negara, dengan sudut pandang filosofis yang lebih mendalam.

Rustam mengutip pernyataan Dr Suraya Afiff, dosen yang juga aktif di Pusat Kajian (PUSKA) Antropologi FISIP Universitas Indonesia, bahwa di dalam hak-hak dasar warga negara terkandung hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Partai politik mempunyai peran penting di mana saja, yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi," kata Rustam. Hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang baik adalah tanggung jawab pemerintah. Namun dalam kaitannya dengan parpol, dimana partai politik menempatkan kadernya pada lembaga negara dan pemerintahan, hendaknya mereka dapat



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU

membantu setiap warga negara memperjuangkan hak-hak sipil tersebut.

Pembahasan secara lebih lanjut menyoroti pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Presentasi makalah tersebut kemudian direpson dalam sesi diskusi panel oleh enam fraksi partai di DPRD Kabupaten Sanggau, antara lain perwakilan dari Fraksi PDS, partai Golkar, PDIP, PAN, partai Demokrat, dan PDKS.

Berbicara tentang peran parpol, Jumadi S.Sos dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sanggau mengungkapkan definisi hingga langkah-langkah parpol sebagai bagian dari proses demokrasi.

Nasri Alisan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjabarkan pelaksanaan pelayanan publik dalam bentuk-bentuk konkret



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU

dalam pelaksanaan pembangunan di Sanggau, diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya. Pembahasan topik pelayanan publik ini semakin menghangat ketika pada sesi selanjutnya, para peserta seminar diberi kesempatan untuk bertanya maupun merespon presentasi-presentasi sebelumnya. "APBD tidak pro rakyat," komentar seorang peserta, yang langsung disambut suara riuh peserta lain yang menyatakan setuju.

Sedangkan peserta lainnya juga mengomentari "di Sanggau tidak ada universitas," ketika pembahasannya merujuk pada pelaksanaan pendidikan. Bahkan ada peserta seminar yang mengungkapkan komentar bercampur emosi karena keprihatinan atas kinerja pemerintah di pusat maupun di daerah. Jajaran peserta yang terdiri dari alumni Sekolah Demokrasi Sanggau, anggota KKDS, HIPMI, Pemuda Pancasila, dan ormas lainnya sangat antusias dengan diskusi yang berlangsung. Bagaimanapun, kepedulian mereka atas kondisi pembangunan saat ini merupakan bukti perwujudan penting kesetiaan mereka sebagai warga negara yang baik. (yooce tutkey)



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU

Warna-warni Indonesia Berbaur dalam Inaugurasi

Sejak pukul 15.30 di lobi Hotel Grand Narita Sanggau sudah terlihat warna-warni busana adat yang dikenakan beberapa orang. Ada yang berbusana adat Dayak, ada yang berpakaian adat Melayu, serta ada pula yang mengenakan baju merah khas Tionghoa. Menjelang sore semakin ramai dan beragam tetamu yang datang mengenakan pakaian adat nusantara.

Minggu 16 Desember 2012, di ruang pertemuan serba guna diadakan inaugurasi kelulusan peserta Sekolah Demokrasi Sanggau angkatan kedua. Sebanyak 34 peserta terlihat gagah dan anggun dengan pakaian yang dikenakan. Rasa bangga dan senang diabadikan peserta lewat kamera bersama keluarga maupun teman.

Suka cita bercampur semangat pluralisme, bahkan beberapa peserta mengenakan pakaian adat selain sukunya sendiri. "Karena suka. Lagipula sebenarnya saya mencari pakaian adat Madura tetapi tidak ketemu. Saya pakai baju Tionghoa ini karena saya pikir tidak ada yang pakai, jadi saya mau melengkapi keberagaman," ujar Heri Priyanto. Dia memakai pakaian adat Tionghoa, padahal menurut pengakuannya ia berasal dari suku Dayak.

Sedikit berbeda dengan Heri, Natali Bunga Lawele yang notabene asli dari Sulawesi Tengah, memakai pakaian adat Melayu berwarna putih. "Saya tidak ketemu baju adat dari daerah asal saya, jadi saya hanya dapat yang ini," ungkapnya. Alasan yang sama dikemukakan juga oleh Johana

Sandra Ester dan Hance Edwin Talumepa, yang mengenakan baju adat Bali padahal keduanya sehari-hari fasih berbahasa Manado. Walau demikian, ada pula peserta Sekolah Demokrasi yang mengenakan baju adat sesuai suku mereka.

Turut hadir pada inagurasi, satu di antara Board Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Rustam Ibrahim. Dia memberi kata sambutan sekaligus ikut membagikan plakat simbolis kelulusan kepada 34 orang peserta Sekolah Demokrasi Sanggau angkatan kedua tahun 2012.

Setelah menempuh satu tahun pendidikan in class maupun out class, para peserta Sekolah Demokrasi Sanggau angkatan kedua menghadapi ujian pada 1 Desember 2012. Dari 40 orang peserta terseleksi, sebanyak 37 orang yang menyelesaikan pendidikan andragogi di Sekolah Demokrasi Sanggau.

Direktur Elpagar, Furbertus Ipur dalam kata sambutannya mengucapkan selamat dan sekaligus berpesan kepada lulusan-lulusan Sekolah Demokrasi Sanggau untuk melanjutkan perjuangan demokrasi di Sanggau. "Kalau nanti masing-masing sudah 'terbang tinggi', jangan lupa untuk singgah di KKDS (Komite Komunitas Demokrasi Sanggau)," pesannya. Alumnus Sekolah Demokrasi pada tahun sebelumnya telah membentuk KKDS, secara otomatis lulusan terbaru dari Sekolah Demokrasi Sanggau juga nantinya menjadi anggota dari KKDS. **(yooce tutkey)**



DOK. SEKOLAH DEMOKRASI SANGGAU



Inaugurasi Sekolah Demokrasi

